

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam skripsi ini penulis lebih fokus terhadap agenda rencana kerjasama Pemerintah Indonesia terhadap dunia internasional dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme pada tahun 2009 sampai 2013. Dimana peristiwa tersebut mengharuskan Indonesia untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk menuntaskan kasus terorisme dan juga untuk memulihkan kepercayaan negara Indonesia dalam keamanan, politik maupun dalam aspek ekonomi.

Terorisme di Indonesia telah terjadi sejak lama dan merupakan terorisme lokal, aksi terorisme berawal ketika terjadinya Bom Bali I yang telah merugikan Indonesia dalam segala segi aspek terutama citra negara Indonesia menjadi buruk di dunia Internasional, hal ini mendorong adanya perubahan kebijakan luar negeri Indonesia yang mengarah lebih fokus untuk mengembalikan citra di dunia Internasional. Akan tetapi, pemboman yang dilakukan oleh teroris masih terus berlanjut hingga pemboman yang terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta tahun 2009 yang lalu, sehingga mendorong Indonesia harus lebih banyak berkerjasama dengan negara lain maupun organisasi internasional agar terciptanya keamanan dan ketrentaman bagi negaranya.

Aksi kekerasan yang dilakukan teroris di Indonesia akan menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia di masa mendatang. Di tingkat bilateral Indonesia dituntut untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara seperti Australia, AS, Jepang dan negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya untuk meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam memerangi terorisme internasional. Hal yang sama juga berlaku di tingkat regional, misalnya ASEAN di mana Indonesia perlu mendorong berlanjutnya kerjasama kongkrit antar negara dalam pemberantasan terorisme internasional.

Persoalan politik-keamanan ini melibatkan aspek yang sangat luas, bukan hanya didominasi oleh persoalan dan dimensi internasional, namun juga domestik. Perkembangan lingkungan yang dinamis ini, menuntut Indonesia mampu merumuskan strategi politik luar negeri dan kerjasama Internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional sebagai patokan bagi diplomasi Indonesia.¹

Indonesia harus menghadapi tantangan keamanan yang lebih kompleks sebab dimensi keamanan semakin meluas dan mencakup, baik keamanan vertikal maupun horisontal. Dengan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : ***“Kerjasama Pemerintah Indonesia Terhadap Dunia Internasional dalam Mencegah dan Menanggulangi Terorisme (2009-2013)”***

¹ Bantarto Bandoro, “Nat’l interest and Indonesian Diplomacy”*The Jakarta Post*, 8 september 2008

B. Tujuan penulisan

Untuk mengetahui arah kerjasama Indonesia terhadap dunia internasional dalam mencegah dan menanggulangi terorisme pada tahun 2009-2013.

C. Manfaat Penulisan

1. Penerapan teori terhadap arah kerjasama pemerintah Indonesia terhadap Dunia Internasional dalam mencegah dan menanggulangi Terorisme pada tahun 2009-2013.
2. Dan dapat menjelaskan dalam kerjasama organisasi multilateral maupun kerjasama bilateral dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.

D. Latar Belakang Masalah

Di dalam sistem dunia yang kompleks dan mengarah dari unipolaritas menuju multipolaritas² atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai nonpolaritas,³ hubungan internasional melibatkan berbagai aktor dengan berbagai tingkat kekuatannya. Dalam permasalahan dan tantangan politik dan keamanan dalam perkembangan dunia yang begitu cepat dan global, namun tidak menentu, memerlukan pendekatan analisis serta cara-cara baru untuk memperkuat kebijakan luar negeri serta kerjasama Internasional Indonesia di dalam agenda keamanan yang semakin luas. Bahkan, bagi Indonesia

²Global Trends 2015: A Dialogue about the Future with Nongovernment Experts, Washington DC., NIC, 2000, diakses di http://www.dni.gov/nic/PDF_GIF_global/globaltrend2015.pdf

³Ricard N. Haass. "The Age of Nonpolarity; What Will Follow U.S. Dominance," *Foreign Affairs*, May/June 2008, Vol. 87, Issue 3, hlm. 44.

sebagai negara berkembang, tantangan keamanan yang dihadapi lebih kompleks jika dibandingkan dengan negara maju. Kondisi demikian sebagaimana dialami oleh kebanyakan negara-negara berkembang, tantangan keamanan yang dihadapi lebih kompleks sebab persoalan pembangunan negara bangsa, dinamika sistem dan manajemen politik serta pemerintahan masih dihadapkan kepada persoalan-persoalan domestik, seperti pembangunan politik yang belum mapan.⁴

Seiring dengan perkembangan keamanan dan dinamika global, kebijakan pertahanan dan keamanan juga mengalami penyesuaian. Isu keamanan menjadi lebih kompleks karena masalah keamanan kini juga menyangkut *transnasional Security Crime* seperti terorisme, perdagangan obat, migrasi ilegal, pencucian uang, penyebaran senjata pemusnah massal baik nuklir maupun kimia.⁵ Terorisme merupakan salah satu ancaman terbesar bagi Indonesia pasca kejadian 11 september di gedung WTC Amerika Serikat. Ancaman tersebut yang telah terbukti serius mengancam dan mengganggu stabilitas keamanan dan politik diseluruh dunia.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Hal ini menyebabkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam kongresnya di Wina

⁴Lloyd Pettiford and Melissa Curley, *Changing Security Agendas and the Third World*, London-New York, Pinter Publishers, 1999, hlm.21-39.

⁵Edi prasetyono, "Perkembangan Internasional dan kepentingan nasional Indonesia" http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/perkembangan_internasional_dan_kennas_indo_ep.pdf.

Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian. Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (Extraordinary Measure) karena berbagai hal:⁶

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (the greatest danger) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (the right to life) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
- b. Target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
- c. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- d. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

⁶Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, 28 Januari 2004.

Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial.⁷

Indonesia menjadi sasaran bom para teroris, terorisme melakukan aksinya di Indonesia “karena masih lemahnya payung hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan suburnya tingkat kemiskinan” ditambah dengan “terbatasnya kualitas dan kapasitas intelegen negara”. Dari kelemahan-kelemahan tersebut diatas maka Indonesia merupakan tempat yang paling empuk untuk dijadikan tempat aksi kejahatan terorisme sehingga Indonesia yang dililit banyak masalah menjadi amat menderita atas kejahatan terorisme tersebut.⁸ Hal ini dapat dilihat dari adanya serangan bom oleh teroris di Indonesia, seperti bom bali I tanggal 12 Oktober 2002, Bom Hotel JW Marriot pada Agustus 2003, Bom di depan kedutaan Australia tahun 2004, Bom Bali II tanggal 01 Oktober 2005, serta Bom Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di Jakarta pada tanggal 17 Juli tahun 2009. Dalam kenyataan ini pemerintah Indonesia harus mengupayakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme agar tidak terjadi lagi pemboman di wilayah kesatuan Indonesia.

Tragedi bom di Indonesia telah terjadi sejak lama dan terus berlanjut, hal ini mendorong Indonesia terus mengupayakan dan meningkatkan kerjasama

⁷Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT Rafika Aditama, Bandung, 2000, hlm 58.

⁸Terorisme bagaimana mengatasinya, diakases 15 oktober 2013 <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/terorisme-bagaimana-mengatasinya>

internasional dalam mencegah dan menanggulangi aksi terorisme yang selalu terjadi di setiap saat, padahal berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna untuk mengembalikan citra baik di dunia Internasional, menstabilkan politik dalam negeri serta meningkatkan keamanan dan perekonomian Indonesia.

Dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dan lautan yang sangat luas, selanjutnya tantangan dalam upaya mencegah dan menanggulangi aksi terorisme adalah kemampuan sistem pertahanan Indonesia yang masih relatif terbatas serta dukungan perangkat hukum yang juga masih belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Indonesia menjadi sasaran bagi aktivitas terorisme. Tentunya akan membawa dampak yang negatif bagi perekonomian Indonesia. Disaat Indonesia mulai bangkit dari keterpurukan dan selangkah lagi untuk menjadi negara yang mandiri, tiba-tiba saja kembali dijatuhkan. Seakan-akan ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kesuksesan yang dialami oleh negara Indonesia, dan menginginkan kondisi di Indonesia menjadi tidak menentu. Hal ini terbukti dengan penarikan investor luar negeri, aksi pemboman berpotensi mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri untuk jangka panjang. Pemboman yang terjadi turut berimbas pada minat investasi asing.⁹

Peran Indonesia melawan terorisme menjadi sangat penting, karena jika ada serangan terorisme di Indonesia, Indonesia tidak akan bisa berbuat banyak, citra negara akan rusak, pemasukan negara akan menjadi minim, khususnya dalam hal

⁹Investor Qatar Batal Berkunjung ke Indonesia <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/76731-investor-qatar-batal-berkunjung-ke-indonesia> diakses tanggal 15 Oktober 2013

investasi, karena tidak ada yang tertarik untuk berinvestasi di negara yang penuh dengan kegiatan terorisme. Aksi pemboman terorisme di Indonesia juga terus berlanjut bahkan hampir terjadi setiap tahunnya, sejak terjadinya bom terorisme di Indonesia, Indonesia berusaha meningkatkan kerjasama Internasional agar dapat mencegah dan menanggulangi terorisme dengan mudah, akan tetapi, aksi terorisme nyata dan berlanjut sehingga mendorong pemerintah Indonesia akan selalu meningkatkan kerjasama Internasional agar terciptanya stabilitas politik dan peningkatan ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, upaya harus selalu dilakukan dengan sistemik dan harus berkelanjutan.

Indonesia memiliki kedudukan strategis dalam berbagai kerjasama organisasi multilateral maupun kerjasama bilateral. Keterlibatan Indonesia dalam OKI, ASEAN, APEC, dan Konferensi Asia Afrika secara tidak langsung juga mempertinggi posisi tawar Indonesia baik di mata Barat maupun negara-negara Islam di Timur Tengah. Sayangnya posisi strategis tersebut oleh Indonesia belum dilakukan secara maksimal dengan lebih berperan dalam menciptakan perdamaian dan keamanan global. Hal ini yang membuat Indonesia harus mengoptimalkan upaya dalam menjaga keamanan, mencegah, dan menanggulangi terorisme agar tidak terjadi lagi bom di Indonesia.

E. Pokok Permasalahan

Bedasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang penulis rumuskan adalah :

Bagaimana kerjasama pemerintah Indonesia terhadap dunia internasional dalam mencegah dan menanggulangi terorisme pada tahun 2009-2013?

F. Kerangka Pemikiran/ Teori yang digunakan

1. Teori Kepentingan Nasional

Dalam teori ini menjelaskan bahwa untuk kelangsungan hidup suatu negara maka negara harus memenuhi kebutuhan negaranya dengan kata lain yaitu mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan berjalan dengan stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan keamanan dengan kata lain jika kepentingan nasional terpenuhi maka negara akan tetap *survive*. Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memadu para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri maupun dalam hal kerjasama Internasional. Maka dalam tulisan ini, dapat juga dipahami dengan menganalisa Teori Kepentingan Nasional (National Interest) Daniel S. Papp yang mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, yang mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara selalu berusaha untuk meningkatkan

perekonomian negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan suatu negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya.¹⁰

Menurut Jack C. Plano dan Ray Olton, Kepentingan Internasional adalah :

“kepentingan Nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan, yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur itu mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.”¹¹

Oleh karena itu, untuk memenuhi segala kepentingan nasionalnya, maka Indonesia melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, dan juga dapat bersaing dengan negara lain. Dalam kasus pencegahan dan penanggulangan terorisme, arah kebijakan luar negeri Indonesia yaitu mengacu kepada pemulihan perekonomian bangsa yang menurun setelah hampir bangkit kembali dari keterpurukan perekonomian pasca Bom Bali I dan II. Akan tetapi penulis akan lebih condong dalam arah kerjasama pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme terhadap dunia internasional melalui kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral. Dan lebih penting juga

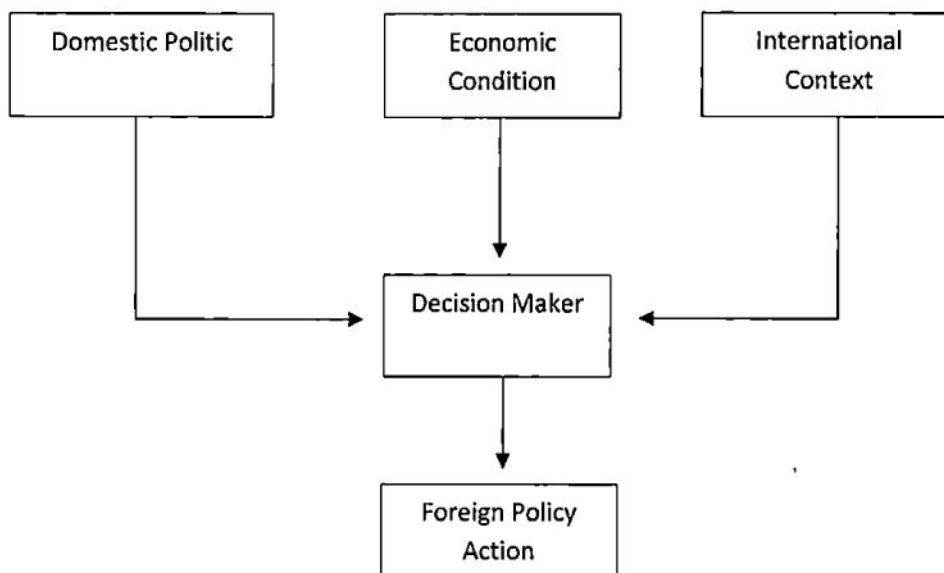
¹⁰Daniel S. Papp, *“Contemporary International Relation”: A Framework for Understanding*, Second Editions (New York: MacMillan Publishing Company, 1988), hal 29

¹¹Jack C. Plano & Roy Olton, *“Kamus Hubungan Internasional”*, Jakarta, Putra A Bardin, 1999

pemerintah haruslah bersifat *Prudence* (adalah kemampuan menilai kebutuhan dan keinginan sendiri sambil dengan seksama menyeimbangkannya dengan kebutuhan dan keinginan orang lain). Karena kepentingan nasional suatu bangsa tidak hanya mementingkan kebutuhannya sendiri, tetapi juga harus mementingkan kepentingan nasional negara lain.¹²

2. Teori pengambilan Keputusan Luar Negeri

Proses pengambilan keputusan Luar Negeri (William D. Coplin)



Decion making Theory ini juga tercantum dalam GBHN, yaitu kebijakan haruslah diabdikan untuk kepentingan nasional. Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara maka kita harus mempertanyakan para pemimpin

¹²Tri Poetranto, *Op.Cit.*

negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Tindakan kebijakan luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsederasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer negara tersebut termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan/keamanan. Ketiga, konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapinya).¹³

Dalam masyarakat internasional terus berubah secara dinamis sebagai konsekuensi dari perkembangan peradaban umat manusia yang tidak pernah henti. Oleh karena itu, berbagai pendekatan dan analisis internasional serta ilmu politik juga memerlukan penyegaran untuk dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi. Kajian mengenai persoalan politik-keamanan dalam kebijakan luar negeri Indonesia juga memerlukan penyesuaian atas perkembangan yang terjadi pada aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, perilaku politik dan sebagainya, baik pada lingkungan domestik maupun internasional. Selain itu perkembangan sisi konseptual/teoritis dapat memberikan pengayaan (*enrichment*) dalam analisis dan proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan suatu keputusan luar negeri.¹⁴

¹³Nugroho, Taufik Ismail. Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Bom Bali 2002-2006. Yogyakarta: Skripsi, Fisipol UMY, 2008. Hal 13

¹⁴Adriana Elisabeth, *et al.*, *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hal. 141.

3. Teori Kerjasama Internasional

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori kerjasama internasional, karena semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut. Menurut K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak. Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:¹⁵

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.

¹⁵K.J Holsti, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 652-653

- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kemudian kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa: "Kerjasama Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional."¹⁶

Pada dasarnya kerjasama antar negara dilakukan oleh dua negara atau lebih adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai kepentingan mereka. Kerjasama merupakan bentuk interaksi yang paling utama karena pada dasarnya kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang timbul apabila ada dua orang atau kelompok yang saling bekerjasama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai upaya suatu negara

¹⁶Koesnadi Kartasasmita, *Administrasi Internasional*, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1977, hal. 19

untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya. Indonesia sangat memerlukan kerjasama dengan beberapa negara untuk meningkatkan keamanan domestik maupun keamanan internasional terutama dalam penanggulangan dan pencegahan terorisme di Indonesia.

G. Hipotesa

Pemerintah Indonesia mempunyai arah kebijakan dan kerjasama internasional dalam mencegah dan menanggulangi aksi terorisme pada tahun 2009-2013 seperti:

1. Peningkatan kerjasama Indonesia dengan Australia yang berupa peralatan teknologi, serta peningkatan kemampuan bidang intelejen, dan penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.
2. Peningkatan kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam pengembangan kemampuan melalui pelatihan pasukan khusus untuk penanggulangan terorisme.
3. Serta peningkatan kerjasama multilateral melalui ASEAN dalam pembahasan forum-forum rutin untuk penanggulangan dan pencegahan terorisme khususnya di wilayah Asia Tenggara.

H. Jangkauan Penelitian

Batasan penting ditetapkan agar kajian ini bisa lebih terfokus. Dengan alasan tersebut, penulis dapat menetapkan batasan waktu kerjasama Indonesia terhadap dunia internasional dalam mencegah dan menanggulangi serangan terorisme yaitu pada tahun 2009-2013, karena pada tahun tersebut merupakan adanya peningkatan

kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi terorisme di Indonesia dari serangan terorisme.

I. Sistematika Penelitian

Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan metode studi pustaka, oleh karena itu data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi buku, makalah ilmiah, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, data internet, dan literature lain yang dianggap relevan. Semua data tersebut pada akhirnya akan dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori yang telah ditetapkan.